

## PEDESAAN SEBAGAI MODEL WISATA PENGUAT EKONOMI PENDUDUK LOKAL

<sup>1</sup>Rieke Retnosary

<sup>2</sup>N Neni Triana

<sup>3</sup>Netti Nurlenawati

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan  
Karawang

[rieke.retnosary@ubpkarawang.ac.id](mailto:rieke.retnosary@ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>

[neni.triana@ubpkarawang.ac.id](mailto:neni.triana@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>

[netti.nurlenawati@ubpkarawang.ac.id](mailto:netti.nurlenawati@ubpkarawang.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Tourism opportunities provide added value for residents in addition to contributing to the country and region. The tourism offering model develops and shifts to local in the form of rural tourism which provides a different experience for tourists. However, in the process, the short-term oriented expectations of residents have become an obstacle in the development of this community-based tourism model. Collaboration between stakeholders is a vital thing in the success of this project. It is necessary to approach communication, discussion and negotiation in the implementation of rural tourism projects to develop and be sustainable. This research provides an overview of the collaboration model from several previous studies with circular concept study.*

*Key words: Tourism opportunities, rural tourism, local residents, stakeholders, collaboration models*

### ABSTRAK

Peluang wisata memberikan nilai tambah bagi penduduk lokal selain memberikan kontribusi pada negara dan daerah. Model penawaran wisata menjadi berkembang dan bergeser pada nilai lokal berupa wisata pedesaan yang memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan. Namun pada prosesnya, harapan penduduk lokal yang berorientasi pada jangka pendek menjadi kendala berkembangnya model wisata berbasis komunitas ini. Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hal paling penting dalam keberhasilan proyek ini. Perlu pendekatan komunikasi, diskusi dan negosiasi dalam pelaksanaan proyek wisata pedesaan menjadi berkembang dan berkelanjutan.

Penelitian ini, memberikan gambaran model kolaborasi yang di sari dari beberapa studi terdahulu dengan membuat konsep lingkaran.

*Kata kunci: Peluang wisata, wisata pedesaan, penduduk lokal, pemangku kepentingan, model kolaborasi*

## PENDAHULUAN

Penawaran wisata di setiap negara memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah termasuk peluang bagi masyarakat secara umum dan penduduk lokal dimana tempat wisata itu berada. Kontribusi wisata memberikan nilai manfaat selain devisa juga membuka peluang kerja baru sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Qina *et al.* 2019). Kontribusi terhadap nilai ekspor pun menjadi bertambah.

Penduduk lokal adalah masyarakat atau komunitas yang langsung mendapatkan dampak dari keberadaan wisata baik itu secara positif maupun negatif. Disinilah peran pemangku kepentingan diperlukan, baik itu untuk proses pengembangan maupun proses penyelesaian masalah. Keterlibatan pemerintah sebagai pemangku utama yang bertanggung jawab atas proses dan dampak wisata. Pemerintah melakukan peran sosial dan menetapkan strategi untuk mengurangi stres (*Culture Shock*) bagi penduduk dalam kegiatan pariwisata sambil meningkatkan pengembangan pariwisata, serta memungkinkan penduduk setempat untuk meningkatkan pendapatan dan gaya hidup lebih baik serta harmonis (Jaafar dkk., 2015).

Menurut Khodadadi (2016), Pemerintah sebagai otoritas memiliki peluang untuk membuat strategi pengembangan kawasan wisata dengan rencana kerja tahunan dan jangka panjang serta mencari peluang investasi untuk menjaga pariwisata agar berkelanjutan. Poin-poin inilah yang harus menjadi perhatian dalam membangun *trend* atau model wisata.

## Model Wisata

Model wisata yang ditawarkan setiap tempat di berbagai negara sangat beragam. Selain wisata alam, wisata cagar budaya (Bhargava, 2022; Rukayah dkk., 2022; Saydam dkk, 2022 ), urban atau wisata kota (Medda and Lipparini, 2021; Yasir dkk, 2021; Yagi dan Frenzel, 2022), serta wisata religi (Suprpti dkk, 2019; Collins-Kreiner, 2020; Iliev, 2020 ) juga diminati.

Sayangnya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya kurang memiliki inisiatif dalam pelestarian (Rahmawati dkk., 2014) dan promosi (Occutisan dan Setyanto, 2020). Kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap pemeliharaan juga terjadi. Rohman dkk. (2021) membahas tentang minimnya kontrol atas pengawasan dalam aktivitas wisata. Adapun regulasi yang menjadi sentral penyeimbang aktivitas masih kurang diperhatikan (Yasir dkk, 2021). Kajian tersebut dikuatkan oleh Rukayah dkk (2022) yang juga fokus pada isu regulasi. Fitri dkk (2015) membahas tentang konservasi yang dibutuhkan untuk keberlanjutan serta fokus pada kunci keberhasilan dan isu-isu perlunya menjalin kerjasama dengan publik/komunitas.

## **Wisata Pedesaan**

Penawaran lain yang menjadi salah satu model yang diminati adalah wisata pedesaan (*rural tourism*). Wisatawan memilih wisata pedesaan yang diharapkan memiliki utilitas tertinggi setelah pertimbangan yang komprehensif bagi mereka dengan atribut penting untuk mendapatkan kepuasan melalui preferensi lokasi, kegiatan di luar ruangan, fasilitas tambahan, dan keramahan pihak pengelola (An dan Alarcón, 2021).

Wisata pedesaan memberikan peluang bagi penduduk lokal untuk mendapatkan nilai manfaat dari keberadaannya, baik itu secara finansial maupun peluang pekerjaan yang lebih baik. Penduduk memiliki keunggulan modal budaya dan sosial asli mereka untuk memilih strategi yang paling efektif untuk mencapai keseimbangan kepentingan yang dapat diterima di bidang pariwisata pedesaan (Ma dkk., 2022). Modal sosial memainkan peran penting dalam tahap awal pengembangan Desa Wisata (Dai dkk., 2021). Namun, orientasi pariwisata pedesaan akan memberikan dampak lain bagi penduduk dimana keterlibatan mitra eksternal membawa rasa kepemilikan yang lebih rendah meskipun manfaat ekonomi lebih tinggi akan diterima oleh penduduk (Zhou, 2021).

Interaksi sinergis pemerintah pusat dan daerah dapat mendorong pesatnya perkembangan pariwisata pedesaan (Liu dkk., 2020). Pemerintah pusat berperan sebagai pembimbing pariwisata pedesaan menuju arah yang diharapkan, dan pemerintah daerah memainkan peran melayani dengan mengelola langsung praktik pariwisata dan berkoordinasi dengan eksternal dan penduduk untuk memberikan layanan dan memecahkan masalah. Menurut Hirszenberger dkk. (2019) yang dimaksud dengan eksternal adalah berbicara tentang pemangku kepentingan yang berhubungan dengan masalah hukum, pengguna, subkontraktor, media publik, dan posisi otoritas pendanaan. Perlu komunikasi dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan sebagai aktor dalam menetapkan tujuan pembangunan.

## **Kolaborasi Pemangku Kepentingan**

Kolaborasi merupakan keselarasan antara pemangku kepentingan untuk mengelola destinasi pariwisata untuk keberlanjutan. Masalah terjadi karena perbedaan tujuan dan sudut pandang, terutama pada pemerintahan yang merasa bertanggung jawab penuh atas pengelolaannya (Santa dan Tiatco, 2019). Masalah lain adalah pemahaman dan kematangan yang rendah dalam perencanaan lokasi wisata, misalnya target pencapaian yang tumpang tindih dengan memecahnya menjadi beberapa tujuan sehingga membuat biaya investasi menjadi lebih besar (Spencer dan Bean, 2020).

Kolaborasi adalah cara untuk mengelola konflik dan mengambil keputusan yang tepat.

Kolaborasi berfungsi untuk menggabungkan ide dan kesamaan persepsi, menyatukan tujuan dan visi antar pemangku kepentingan. Sementara pendekatan kolaboratif tampaknya merupakan strategi yang baik untuk mengelola konflik semacam itu.

Ada beberapa hambatan penting yang mencegah penerapan metode ini secara efektif. Hambatan kolaborasi terutama menyangkut empat hal berikut: pemangku kepentingan dengan pengaruh yang kuat; kurangnya kekuatan konstruktif; akses informasi yang tidak merata; kurangnya negosiasi, keterampilan komunikasi, dan kesenjangan pengetahuan teknis (Almeidadkk., 2018).

Gray (1989: 236) dalam Jamal dan Getz (1995) menguraikan lima karakteristik utama dari proses kolaborasi yaitu, pemangku kepentingan bersifat independen; solusi muncul dengan menghadapi perbedaan secara konstruktif; kepemilikan bersama atas keputusan yang terlibat; pemangku kepentingan memikul tanggung jawab kolektif untuk arah domain yang sedang berlangsung; dan kolaborasi adalah proses yang muncul, di mana inisiatif kolaboratif dapat dipahami sebagai organisasi yang muncul melalui pengaturan atas nama organisasi secara kolektif sehingga dapat mengatasi meningkatnya kompleksitas di lingkungan mereka.

Perlu untuk menganalisis model-model tertentu di mana kolaborasi menjadi tepat untuk diterapkan. Penerapan model bergantung pada analisis tantangan yang terjadi dilapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kualitatif sebagai metode penelitian dengan studi kasus di Desa Mekarbuana yang bertempat di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Wawancara kecil namun mendalam dilakukan oleh peneliti melibatkan pemangku kepentingan setempat yang diwakili oleh Kepala Desa yang memprakarsai pengembangan wisata pedesaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi penduduk lokal. Dari hasil pengambilan data ini, peneliti melakukan pemetaan fungsi dari analisis lapangan dan dari beberapa penelitian sebelumnya.

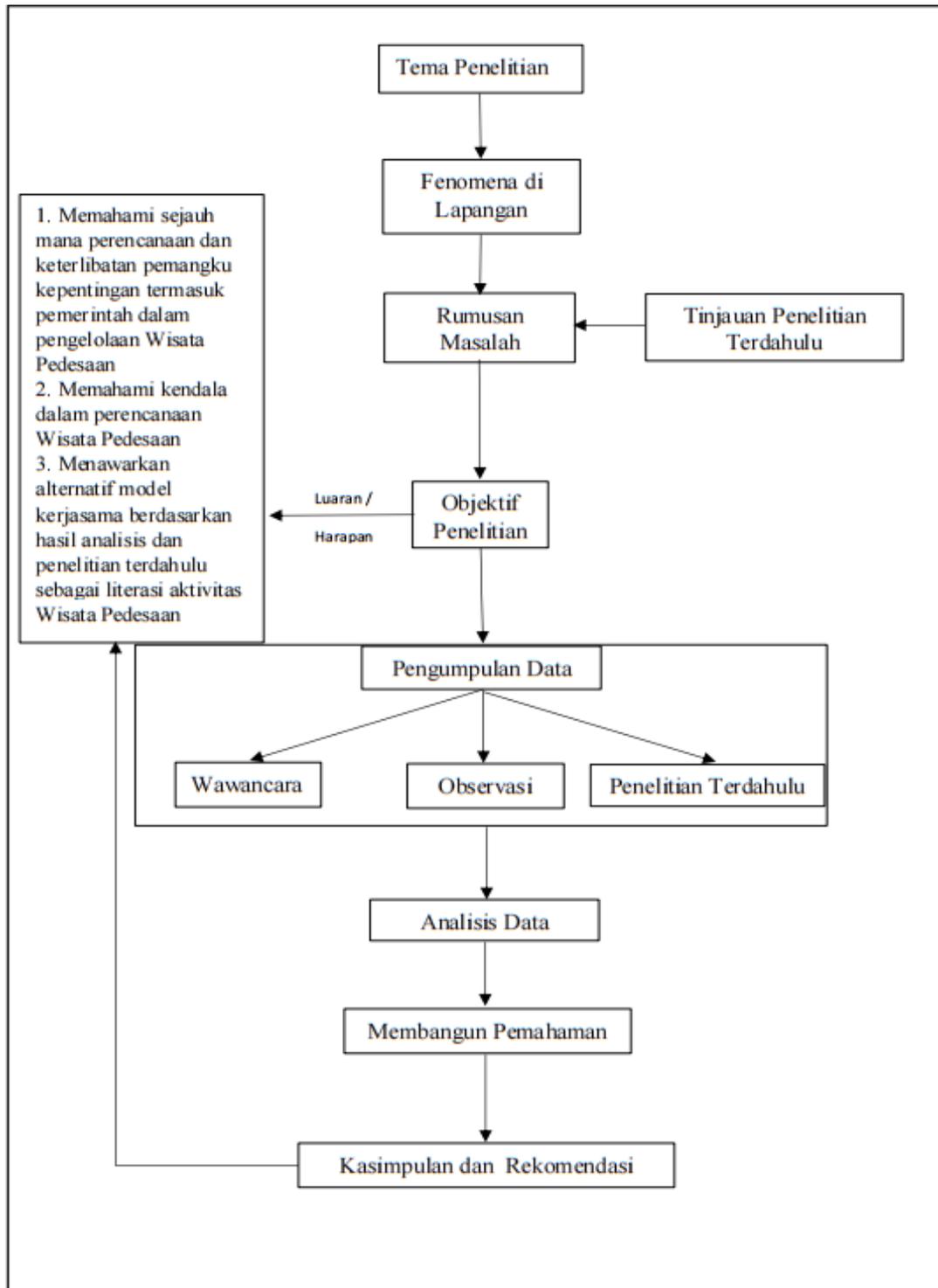
Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana kematangan perencanaan dan keterlibatan pemerintah baik pusat maupun daerah dan permasalahan atau kendala yang dihadapi selama membangun dan mengembangkan wisata pedesaan dan bagaimana lingkaran hubung diantara pemangku kepentingan.

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi penetapan batasan penelitian, pengumpulan informasi melalui peneliti lengkap dalam observasi dan wawancara tatap muka untuk memfasilitasi pertanyaan langsung kepada pemangku kepentingan sebagai responden. Pengambilan data ditunjang dengan audiovisual berupa foto dan rekaman wawancara sebagai protokol untuk mendapatkan dan menyimpan informasi (Creswell dan Creswell, 2018).

Tematik analisis digunakan dalam studi ini. Fungsinya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data yang kemudian dapat dideskripsikan dari hasil pengumpulan data tersebut (Braun dan Clarke, 2006). Metode analisis tematik ini digunakan dalam penelitian karena fleksibilitas dan aksesibilitasnya dari kekaburan atau belum jelasnya informasi.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian dibuat agar selama dilakukannya kegiatan penelitian tersusun dan sesuai rencana. Adapun penelitian ini dimulai dengan menangkap tema di lapangan dari isu-isu yang beredar di lapangan termasuk memahami fenomena. Dalam hal ini adalah pengembangan model wisata pedesaan yang ditunjukkan dengan beberapa informasi dan studi sebelumnya sebagai tinjauan pendahuluan yang menguatkan betapa diminatinya wisata tersebut oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Rumusan masalah dibuat berdasarkan pada tujuan diselesaikannya penelitian ini menjadi objek penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder diambil dari penelitian terdahulu sebagai penguat informasi dan argumen.



**Gambar 1 Prosedur Penelitian**

Analisis data diperlukan untuk memahami kaitan dengan objek penelitian sehingga dapat dilakukan pembahasan dan membuat kesimpulan. Mengumpulkan data dengan triangulasi (Sugiyono, 2012) sebagai pengumpulan data teknis dan sumber yang sudah dimiliki.

Susan Stainback (1988) yang dikutip dalam Sugiyono (2012: 241) menyatakan bahwa "tujuannya bukan untuk menentukan kebenaran tentang beberapa fenomena sosial, melainkan tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman seseorang tentang apa pun yang

diselidiki”.

Dalam penelitian ini, kegiatan analisis diawali bersamaan pada saat melakukan kegiatan pengambilan data observasi (*observation*), dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Kecenderungan atau trend dalam pariwisata disebabkan meningkatnya persaingan antar destinasi dan modifikasi pasar sasaran wisata. Seperti salah satunya adalah wisata yang menawarkan aspek alam atau yang sering disebut wisata pedesaan (*rural tourism*).

Desa Mekarbuana yang terletak di Kabupaten Karawang mulai menawarkan model wisata pedesaan dengan penawaran paket wisata berupa rumah singgah (*home stay*) dan kegiatan-kegiatan wisata di Desa. Dari hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2022 dengan pejabat setempat (Kepala Desa), didapatkan informasi bahwa model yang ditawarkan adalah wisata interaksi dengan keseharian warga, penawaran wisata edukasi dan kegiatan/pertemuan keluarga (*family gathering*).

Rumah singgah yang ditawarkan adalah rumah-rumah penduduk setempat dengan perbaikan untuk kenyamanan pengunjung namun tetap menawarkan keasrian pedesaan. Model rumah singgah ini menawarkan pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan pemilik baik komunikasi, keseharian masyarakat setempat, termasuk makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, penawaran wisata edukasi berupa pengolahan kopi menjadi produk konsumsi andalan yang lain dengan target adalah para siswa di wilayah dan di luar wilayah Kabupaten Karawang selain masyarakat umum dan pencinta kopi.

Tujuan wisata pedesaan di Mekarbuana adalah sebagai salah satu penggerak peningkatan ekonomi masyarakat setempat selain pendapatan Desa. Proyek idealis ini bukan tanpa kendala. Sumber daya manusia sebagai sentral penggiat masih membutuhkan perhatian seperti melakukan edukasi sadar wisata. Adapun penekanan wisata yang dapat memberikan keuntungan secara pendapatan belum dibarengi dengan keahlian pengelolaan bersama meskipun sudah terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai tim kerja inti. Adapun investasi dalam pengelolaan dan pengadaan kebutuhan proses wisata merupakan kendala lain yang membutuhkan penyelesaian. Pengelolaan bersama membutuhkan kesabaran dan persamaan persepsi sebagai langkah awal perencanaan jangka panjang.

Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mempermudah birokrasi atau perencanaan yang ideal, namun masih belum menemukan langkah tepat kerjasama.

Kolaborasi dengan akademisi dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan peluang baik itu dalam model pengabdian maupun penelitian. Analisis situasi yang dilakukan oleh akademisi diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi sehingga keputusan strategis dapat dijalankan.

### **Wisata Berbasis Komunitas**

Wisata Pedesaan adalah model wisata berbasis komunitas (*Community Base Tourism-CBT*). Dimana keterlibatan komunitas yaitu penduduk lokal dalam proyek ini menjadi sangat penting karena partisipasi mereka menjadi alasan utama kegagalan atau keberhasilan model *CBT* (Purmada dkk., 2016; Junaid dkk., 2021; Yasir dkk., 2021).

Menurut Yasir dkk. (2021), komunikasi memegang peranan penting dalam pengembangan wisata pedesaan sebagai tujuan wisata. Komunikasi menjadi jembatan untuk persamaan persepsi dan meredakan konflik dari perbedaan kepentingan.

Seperti contoh kasus dari Mekarbuana, dimana sebagian penduduk lokal masih berorientasi pada pendapatan yang cepat dan berfikir pada kepentingan jangka pendek membuat proyek ini menjadi terganggu dan harus mendapatkan tindak lanjut. Isu ini bukan tanpa alasan, karena rata-rata penduduk berada pada ekonomi keluarga yang belum berkecukupan. Kasus inipun ditemukan pula pada studi Junaid dkk. (2021) bahwa hambatan implementasi wisata pedesaan terganggu oleh adanya masalah sosial budaya dan penduduk hanya fokus pada jangka pendek keuntungan finansial daripada program berkelanjutan jangka panjang. Disinilah kolaborasi akademisi diperlukan, untuk membantu memberikan pemahaman dan edukasi pentingnya proses dalam pengembangan model wisata.

Mengambil pola analisis Junaid dkk. (2021) dalam proses proyek model wisata dimana perlunya dilakukan tahap inisiasi (*initiation*) agar terciptanya kepercayaan; diskusi (*discussion*) dan membangun tim (*team building*) untuk persamaan persepsi; diskusi fokus grup (*focus group discussion*) untuk bertukar informasi dan menyiapkan langkah-langkah strategi; dan implementasi (*implementation*) atau pelaksanaan proses kegiatan.

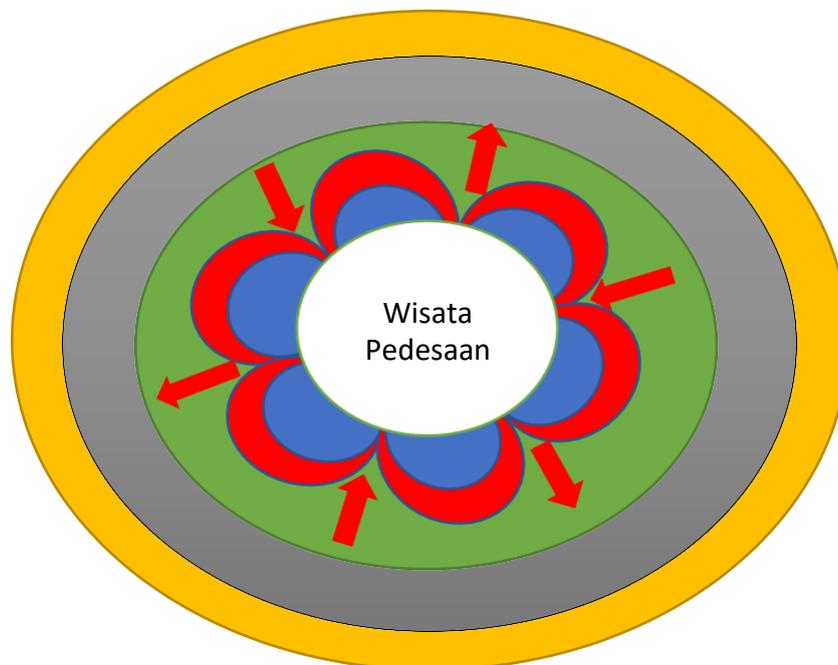
Yasir dkk. (2021) memberikan model komunikasi dengan model Pentahelix (*Penta helix Tourism Communication Model*) , dimana jalur komunikasi saling terkait atau terhubung (*interlink*) yang terdiri dari komunitas (*community: owner, actor, and developer*); akademisi (*higher education: researchers, innovators, and developer* ); perusahaan (*Corporate Social Responsibility: driving force for the economy*); media masa (*means of contact, news, and promotion*); dan Pemerintah (*implementer and person incharge of the policy*)

Seperti salah satu contoh di Cina Tiongkok dimana pemerintah mendorong kebijakan dan penekanan pada regenerasi pedesaan yang berkembang cukup baik. Hasil analisis data sekunder yang dilakukan oleh Liu dkk. (2020) yang bersumber dari regulasi berupa dokumen pemerintah dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai pemerintah daerah dan penduduk di pedesaan menunjukkan bahwa pemerintah pusat memainkan peran pengarah dalam membimbing desa wisata ke arah yang diharapkan, dan pemerintah daerah berperan melayani secara langsung mengelola praktik pariwisata dan berkoordinasi dengan pebisnis dan penduduk lokal sebagai komunitas untuk memberikan layanan dan penyelesaian kendala.

### **Pembahasan**

Fredholm (2017) menyoroti bahwa pengembangan pariwisata harus memastikan stabilitas sosial sebagai prioritas untuk mengembangkan masyarakat dan kebanggaan lokal terhadap tempat, kemudian ekonomi menjadi target berikutnya. Investasi dalam pengelolaan menjadi faktor lain yang sangat diperlukan untuk diperhatikan.

Menganalisis dan memahami situasi, berkomunikasi, persamaan persepsi antar pemangku kepentingan menjadi isu penting untuk keberhasilan menjalankan proyek wisata pedesaan. Tiga kunci sukses dalam meningkatkan partisipasi: Keterbukaan, Kejujuran, dan Berorientasi pada kepentingan publik (Fitri dkk., 2015) perlu diperhatikan. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan kolaborasi dan lingkaran hubung antar pemangku kepentingan:



**Gambar 2 Lingkaran Hubungan Pengelolaan Wisata Pedesaan**

Gambar 2 diatas menunjukkan kegiatan yang saling berkaitan. Adapun warna biru mewakili pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses atau aktivitas wisata. Sedangkan warna merah menunjukkan kendala atau permasalahan yang ada baik berasal dari internal maupun eksternal, seperti perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan, kurangnya investasi yang mengakibatkan proyek berjalan lambat, penyadaran penduduk lokal sebagai kunci utama berjalannya model wisata. Sedangkan warna hijau adalah target kolaborasi sebagai dasar keberhasilan pengelolaan wisata pedesaan. Adapun warna abu-abu menunjukkan regulasi atau kebijakan yang berlaku sebagai dasar pengembangan wisata. Warna kuning sebagai kontribusi wisata.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Partisipasi penduduk lokal adalah inti dari tata kelola lingkungan karena memfasilitasi dan mempromosikan rasa kepemilikan dalam pengambilan keputusan dan masalah pembangunan sosial (Musavengane, 2019). Pemerintah harus memberikan peran yang lebih tinggi kepada penduduk lokal tidak hanya sebagai pelengkap dengan berbagi informasi tetapi lebih untuk membangun kerjasama dalam dua cara, komunikasi sehingga tidak terjadi kontraproduktif dalam perlindungan dan pelestarian; dan keterlibatan atau kerjasama. Gursoy dkk. (2019) menangkap bahwa inisiatif tanggung jawab sosial bisnis memiliki dampak positif langsung dan tidak langsung pada dukungan penduduk dengan memberi mereka manfaat ekonomi dan lingkungan. Inisiatif tersebut juga dapat secara positif memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, J., Costa, C., dan Nunes da Silva, F. (2018). Collaborative approach for tourism conflict management: A Portuguese case study. *Land Use Policy*, 75(2016), 166–179. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.034>
- An, Wookhyun dan Alarcón, Silverio (2021). Rural tourism preferences in Spain: Best-worst choices. *Annals of Tourism Research*, 89(2021)103210. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103210>
- Bhargava, S.K. (2017). Sustainable Development of Cultural-Heritage Tourism Planning with Issues and Challenges. *Social Science Journal for Advanced Research*, 2(3), 1-5.
- Collins-Kreiner, Noga (2020). Religion and tourism: A diverse and fragmented field in need of a holistic agenda. *Annals of Tourism Research*, 82 (2020) 102892. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102892>

- Creswell, John W. and Creswell, J. David (2018) *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. SAGE Publications Ltd. Ed. 5.
- Dai, M., Fan, D. X.F., Wang, R., Ou, Y., dan Ma, X. (2021). Residents' social capital in rural tourism development: Guanxi in housing demolition. *Journal of Destination Marketing & Management*, 22 (2021) 100663. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100663>
- Fitri, I., Ahmad, Y., dan Ahmad, F. (2015). Conservation of Tangible Cultural Heritage in Indonesia: A Review Current National Criteria for Assessing Heritage Value. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184 ( 2015 ) 71 – 78. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.055>
- Fredholm, S. (2017). Assets in the age of tourism: the development of heritage planning in Ghanaian policy. 34(4), 498–518. <http://dx.doi.org/10.1080/02589001.2017.1285011>
- Hirszenberger, H., Ranogajec, J., Vucetic, S., Lalic, B., dan Gracanin, D. (2019). Collaborative projects in cultural heritage conservation – management challenges and risks. *Journal of Cultural Heritage*, 37, 215–224. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.10.006>
- Jaafar, M., Ismail, S., dan Rasoolimanesh, S. M. (2015). Perceived Social Effects of Tourism Development: A Case Study of Kinabalu National Park'. *Urban Management*, 10(2), 5-20.
- Jamal, Tajim B. dan Getz, Donald (1995). Collaboration Theory And Community Tourism Planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186-204,
- Junaid, I., Sigala, M., dan Banchit, A. (2021). Implementing community-based tourism (CBT): Lessons learnt and implications by involving students in a CBT project in Laelae Island, Indonesia. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 29 (2021), 100295. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100295>
- Liu, C., Dou, X., Li, J., dan Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. *Journal of Rural Studies*, 79 (2020), 177–188. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.046>
- Ma, X. L., Wang, R., Dai, M. L., dan Ou, Y. H. (2022). The action logic and interpretation framework of residents' resistance in rural tourism development. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51 (2022) 79–87. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.02.031>
- Medda, Francesca dan Lipparini, Fiorenza (2021). Impact investment for urban cultural heritage. *City, Culture and Society*, 26 (2021) 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2021.100413>
- Purmada, D. K., Wilopo, dan Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(2), 15-22.
- Santa, E. Dela, dan Tiatco, S. A. (2019). Tourism, heritage and cultural performance: Developing a modality of heritage tourism. In *Tourism Management Perspectives*, 31, 301–309. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.06.001>

- Saydam, M. B., Ozturen, A. dan Kilic, C. (2022). Cultural heritage tourism in North Cyprus: findings from in-depth interviews with experts. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 14( 4), 349-364. <https://doi.org/10.1108/WHATT-03-2022-0035>
- Spencer, Andrew J. dan McBean, Larisa M. (2020). Alignment of tourism investment to the SDGs in Jamaica: an exploratory study. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 12(3), 261-274. <https://doi.org/10.1108/WHATT-02-2020-0010>
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, pp. 241-242.
- Yagi, Tosuke dan Frenzel, Fabian (2022). Tourism and urban heritage in Kibera. *Annals of Tourism Research*, 92 (2022) 103325. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103325>
- Yasir, Y., Firzal, Y., Sulistyani, A., dan Yesicha, C. (2021). Penta Helix Communication Model Through Community Based Tourism (CBT) For Tourism Village Development In Koto Sentajo, Riau, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 37(3), 851- 860. <http://doi.org/10.30892/gtg.37316-718>
- Zhou , L., Wall, G., Zhang, D., dan Cheng, X. (2021). Tourism and the (re)making of rural places: The cases of two Chinese villages. *Tourism Management Perspectives*, 40 (2021) 100910. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100910>